

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI BERBASIS ONLINE MELALUI BINOMO**

**Oleh**

**Muhammad Iqbal**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi bodong. Investasi bodong merupakan suatu bentuk kejahatan yang dimana akan diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam produk atau bisnis, yang sesungguhnya tidak pernah ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan hukum terhadap korban investasi online melalui binomo apabila ditinjau dalam hukum positif di negara Indonesia dan faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban investasi online.

Metode penelitian untuk pendekatan masalah menggunakan yuridis normative dan yuridis empiris dengan di bantu dengan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian terdiri dari kepala unit II subdit *cyrber crime* ditreskrimsus polda lampung, kepala bagian pengawasan bank otoritas jasa keuangan, satu ketua Yayasan lembaga perlindungan konsumen lampung, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka dan studi lapangan serta pengolahan data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi *online* menjadi dua macam yaitu; Perlindungan hukum preventif yaitu pihak dari kepolisian, otoritas jasa keuangan dan yayasan lembaga perlindungan konsumen lebih mengedepankan proses pencegahan sebelum tindak pidana tersebut terjadi,

*Muhammad Iqbal*

yaitu dapat berbentuk penyuluhan hukum terkait investasi bodong, dan perlindungan hukum represif yaitu dengan melakukan proses hukum acara pidana yang berlaku demi mewujudkan cita-cita hukum sendiri. Peraturan mengenai investasi online secara umum terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor yang menghambat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban investasi online melalui binomo, berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu Faktor masyarakat karena dalam kalangan masyarakat masih kurangnya tentang pemahaman investasi, Faktor sarana dan fasilitas masih terdapat kekurangan dari segi sistem dan teknologi yang digunakan dalam mencari pelaku dan aliran dana berkenaan dengan investasi bodong, Faktor hukum karena sampai saat ini belum ada yang mengatur secara khusus mengenai investasi online, Faktor aparat penegak hukum dilihat dari dua variable yaitu kualitatif masih sedikit sdm penegak hukum yang mengerti dalam bidang ITE dan kuantitatif jumlah aparat penegak hukum yang berkaitan dengan ITE jumlahnya belum sesuai dengan daftar susunan personel atau bisa di bilang masih kurang, Faktor budaya di dalam faktor ini masih banyak masyarakat yang ingin kaya dengan instan atau tamak tetapi tidak melihat resiko yang tinggi.

Rekomendasi penelitian ini adalah untuk lembaga yang menangani masalah investasi bodong ini antara lain Kepolisian Daerah Lampung, Otoritas Jasa keuangan dan Yayasan lembaga Konsumen Indonesia agar dapat memaksimalkan upaya perlindungan hukum preventif dan represif dan meminimalisasikan faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum dalam penegakan hukum, serta memperjelas pengaturan atau regulasi mengenai tindak pidana investasi online dan upaya hukum yang diaturnya. Sehingga aparat penegak hukum dapat meningkatkan perannya.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Investasi online**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF VICTIMS ONLINE BASED INVESTMENT THROUGH BINOMO**

**By**

**Muhammad Iqbal**

*This study aims to find out about criminal law protection for victims of fraudulent investment crimes. Fraudulent investment is a form of crime in which a certain amount of money is asked to invest in a product or business, which actually never existed. The formulation of the problem in this research is legal protection efforts for online investment victims through binomo when viewed in positive law in Indonesia and the inhibiting factors in providing legal protection for online investment victims.*

*The research method for approaching the problem uses normative juridical and empirical juridical with the help of primary data and secondary data. The research informants consisted of one head of unit II sub-directorate cyber crime ditreskrimsus Polda Lampung, head of the bank supervision section of the financial services authority, head of the Lampung consumer protection foundation, and Criminal Law Academics at the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was carried out by library research and field studies and data processing was analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion that have been carried out, it is concluded that there are two types of criminal law protection for victims of online investment crimes, namely; Preventive legal protection, i.e. parties from the police, financial services authorities and foundations of consumer protection institutions prioritize the prevention process before the crime occurs, namely, it can take the form of legal counseling related to fraudulent investments, and repressive legal protection, namely by carrying out criminal procedural processes that apply in order to realize one's own legal ideals.*

*Regulations regarding online investment in general are contained in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Factors that hinder providing legal protection to victims of online investment through binomo, based on research conducted by the author, namely the community factor because in society there is still a lack of understanding of investment, the facility and facility factor still lacks in terms of systems and technology used in finding perpetrators and flow of funds with regard*

**Muhammad Iqbal**

*to fraudulent investments, legal factors because until now there has been no specific regulation regarding online investment, factors of law enforcement officials seen from two variables, namely qualitatively there are still few law enforcement personnel who understand in the field of ITE and quantitatively the number of law enforcement officers who related to ITE, the number does not match the list of personnel composition or you could say it is still lacking. Cultural factors in this factor there are still many people who want to get rich instantly or are greedy but don't see the high risk.*

*The recommendations for this research are for institutions that deal with this fraudulent investment problem, including the Lampung Regional Police, the Financial Services Authority and the Indonesian Consumers Foundation in order to maximize preventive and repressive legal protection efforts and minimize factors that become obstacles to legal protection in law enforcement, as well as clarify regulations. or regulations regarding online investment crimes and the legal remedies they regulate. So that law enforcement officers can increase their role*

**Keywords: Legal Protection, Victims, Online investment**